

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SAMBAS

Wiwin Supriadi

Program Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRACT

In accordance with the Law legislation. 24 of 1992, concerning the expansion of oil palm plantations Kabupaten Sambas Government since 2003 to 2011 to develop 52 325 ha with an extensive reach through partnerships with 22 private sector companies. Covering an area of 18 973 ha or 36.26% are plants that have been produced up to 2012. Velocity and acceleration of the expansion of oil palm plantations unplanned and uncontrolled in Kabupaten Sambas emerging social impacts and the most significant result of the expansion of oil palm plantations is a land dispute between the company and indigenous / local people, farmers and oil palm plantation workers. Quite often it leads to violent conflict and criminalization. Environmental degradation to loss of biodiversity, floods and landslides every year due to conversion of protected areas to oil palm plantations. Oil palm plantation development has also become a political commodity and interest of very visible in the construction of the apparatus of the oil palm plantations, has been the arena of political negotiations between politicians with planters.

Keywords: oil palm plantation, palm plantation expansion, the impact of oil palm plantations

PENDAHULUAN

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat, Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai target-target pembangunan. Oleh karena kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini diukur melalui *Human Development Index* (HDI) yang di Indonesia dikenal dengan istilah Indek Pembangunan Manusia (IPM). Berarti pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan angka IPM.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh lingkungan usaha yang kondusif diharapkan dapat meningkatkan para investor dalam menanam modalnya yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya.

Kalimantan Barat umumnya dan Kabupaten Sambas khususnya sebagai wilayah agraris, sektor pertanian selayaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam PDRB memungkinkan bahwa keunggulan komperatif pada masing-masing daerah adalah di sektor pertanian (Todaro, 2000). Sehingga pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Secara tidak langsung bahwa sektor pertanian dalam hal ini perkebunan kelapa sawit membuka lapangan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat.

Kelapa sawit merupakan pengembangan subsektor perkebunan yang berbasis agribisnis. Aktivitas perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya

memberikan nilai tambah yang tinggi di sektor perekonomian. Menurut Gumbira dan Febriyanti (2005), sektor agribisnis merupakan lapangan kerja yang berperan besar dalam penurunan tingkat pengangguran.

Menurut Saragih (2001) dalam upaya penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat keharusan (*necessary condition*). Industrialisasi menjamin iklim makro kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat yang sebagian besar berada pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian. Untuk penguatan ekonomi rakyat secara riil, diperlukan syarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa pengembangan organisasi bisnis petani yang dapat merebut nilai tambah yang tercipta pada setiap mata rantai ekonomi dalam industrialisasi pertanian.

Perkebunan kelapa sawit saat ini merupakan perkebunan yang dikelola oleh swasta dan masyarakat belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola sendiri. Komoditi kelapa sawit ini mendapat perhatian yang cukup tinggi dari pemerintah daerah. Sementara sumbangan pajak kelapa sawit terhadap PAD Kabupaten Sambas hingga tahun 2011 masih di bawah 0,14% (Dispenda 2012), sementara Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipungut dan disetorkan pada pemerintah pusat dan kembali ke pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan. Artinya bahwa sumbangan perkebunan sawit bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat masih sangat kecil (bisa dikatakan belum menghasilkan) dan tidak sebanding dengan perluasan garapan kebun sawit.

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan tersebut maka penelitian ini bermaksud untuk melakukan pemantauan terhadap kebijakan perkebunan komoditi kelapa sawit di Kabupaten Sambas, yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2011 sebagai sebuah langkah awal terhadap perumusan kebijakan yang lebih mandiri dimasa depan.

Permasalahan Penelitian

Pertumbuhan luasan areal perkebunan sawit dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang signifikan, sementara pertumbuhan kesejahteraan masyarakat seolah-olah berjalan di tempat. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah Bagaimana Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Sambas, yang meliputi : 1) Bagaimana dampak kebijakan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sambas; dan 2) Bagaimana dampak kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sambas.

KAJIAN LITERATUR

Di dalam UU No 18 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Secara lebih rinci, beberapa pertimbangan tentang pentingnya mengakselerasi sektor pertanian di Indonesia dikemukakan oleh Simatupang (1997) sebagai berikut:

1. Sektor pertanian masih tetap sebagai penyerap tenaga kerja, sehingga akselerasi pembangunan sektor pertanian akan membantu mengatasi masalah pengangguran.
2. Sektor pertanian merupakan penopang utama perekonomian desa dimana sebagian besar penduduk berada. Oleh karena itu, akselerasi pembangunan pertanian paling tepat untuk mendorong perekonomian desa dalam rangka meningkatkan pendapatan sebagian besar penduduk Indonesia dan sekaligus pengentasan kemiskinan.
3. Sektor pertanian sebagai penghasil makanan pokok penduduk, sehingga dengan akselerasi pembangunan pertanian maka penyediaan pangan dapat terjamin. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pangan pada pasar dunia.
4. Harga produk pertanian memiliki bobot yang besar dalam indeks harga konsumen, sehingga dinamikanya amat berpengaruh terhadap laju inflasi. Oleh karena itu, akselerasi pembangunan pertanian akan membantu menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
5. Akselerasi pembangunan pertanian sangatlah penting dalam rangka mendorong ekspor dan mengurangi impor produk pertanian, sehingga dalam hal ini dapat membantu menjaga keseimbangan neraca pembayaran.
6. Akselerasi pembangunan pertanian mampu meningkatkan kinerja sektor industri. Hal ini karena terdapat keterkaitan yang erat antara sektor pertanian dengan sektor industri yang meliputi keterkaitan produk, konsumsi dan investasi.

Pembangunan perkebunan khususnya kelapa sawit di Indonesia telah membawa dampak ekonomi terhadap masyarakat, baik masyarakat yang terlibat dengan aktivitas perkebunan maupun terhadap masyarakat sekitarnya. Dari hasil penelitian Almasdi Syahza (2007) menjelaskan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota; menciptakan *multiplier effect* ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan; dan ekspor produk turunan kelapa sawit (CPO) dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan telah membawa dampak berkembangnya perkebunan di daerah, khususnya kelapa sawit.

Almasdi Syahza (2007) mengungkapkan dalam penelitiannya yang berjudul Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, kegiatan penelitian untuk mengkaji dampak pembangunan perkebunan kelapa sawit terhadap percepatan pembangunan ekonomi masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan. Penelitian dilakukan melalui survey dengan metode deskriptif (*Descriptive Research*). Informasi diperoleh melalui pendekatan *Rapid Rural Appraisal* (RRA). Hasil diperoleh kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan angka *multiplier effect* sebesar 3,03, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha. Indek

kesejahteraan petani di pedesaan tahun 2003 sebesar 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani mengalami kemajuan sebesar 172 persen. Pada periode tahun 2003-2006 indek kesejahteraan petani 0,18 dan periode tahun 2006-2009 juga mengalami positif sebesar 0,12. Ini berarti kesejahteraan petani pada periode tersebut meningkat sebesar 12 persen.

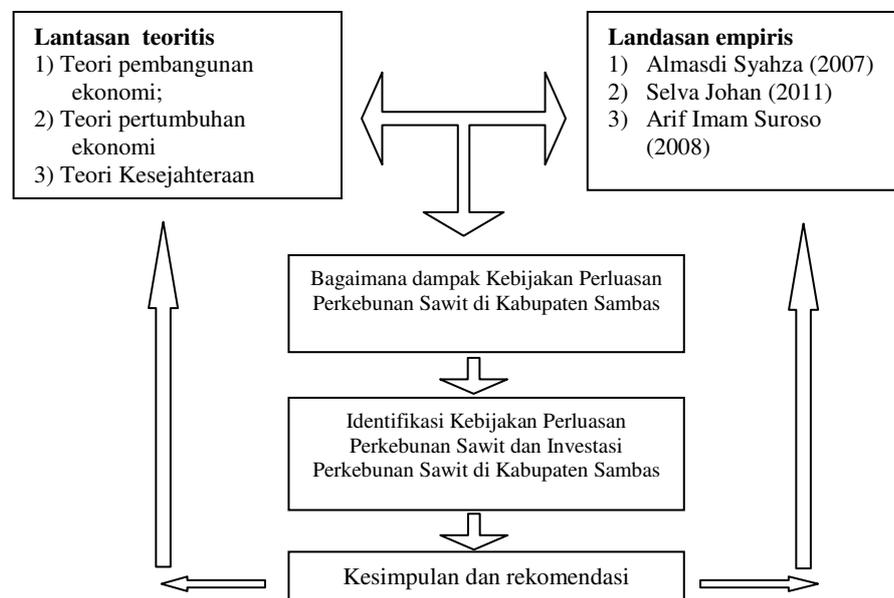
METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian verifikatif dan penelitian deskriptif. Penelitian verifikatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memverifikasi penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan tujuan penelitian seperti apa adanya, dengan mengumpulkan data dan menjelaskan data yang diperoleh sesuai dengan keperluan.

Jenis Data dan Sumber Data

Data diperoleh dari satu sumber yaitu sumber data sekunder yang diperoleh melalui laporan dari instansi terkait yaitu Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sambas, data time series selama tahun 2005 sampai dengan 2011. Data lain berupa data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak terkait seperti perusahaan sawit, petani sawit, masyarakat dan pihak pengambil kebijakan yaitu pemerintah daerah serta instansi vertikal.

Alur Pikir Penelitian



Gambar 1 Alur pikir penelitian

Secara teoritis kesejahteraan masyarakat dapat dicapai apabila pemerintah melakukan pembangunan yang merata disemua wilayah dan aspek kehidupan. Pembangunan merupakan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahza (2007), Johan (2011), dan Suroso (2008) membuktikan pembangunan Pemerintah melalui

perluasan Perkebunan Kelapa Sawit belum sepenuhnya dapat menyentuh kesejahteraan secara langsung, melainkan berpengaruh pada *multiplier effect* sehingga mata pencaharian masyarakat menjadi beragam.

Atas dasar landasan teoritis dan empiris tersebut maka peneliti mencoba untuk melakukan studi yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yang dalam dasawarsa ini telah melakukan perluasan perkebunan sawit, serta bagaimana dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Data

Untuk memenuhi tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka dilakukan dengan analisis deskripsi tentang perkembangan komoditi perkebunan sawit, dampak kebijakan dan dampak kegiatan komoditi perkebunan sawit di daerah Kabupaten Sambas. Dari analisis tersebut diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai konsistensi serta kesinambungan kebijakan komoditi perkebunan sawit sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah dari tahun ke tahun.

PEMBAHASAN HASIL DAN DISKUSI

Permasalahan yang paling menantang bagi pengambil kebijakan dalam masalah pembangunan dan kesejahteraan manusia yang ada di berbagai wilayah di Kabupaten Sambas saat ini antara lain adalah upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat dibarengi dengan upaya pengurangan kesenjangan pendapatan, kemiskinan dan pengangguran. Menurut pendapat (Ali, 2007) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memang penting tetapi tidak memenuhi kondisi yang cukup untuk dapat meningkatkan standar hidup banyak orang yang hidup dengan pendapatan nasional perkapita yang rendah. Meningkatnya kesenjangan dalam pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta semakin persistennya kemiskinan pada masyarakat kelas bawah menjadi permasalahan yang belum tuntas.

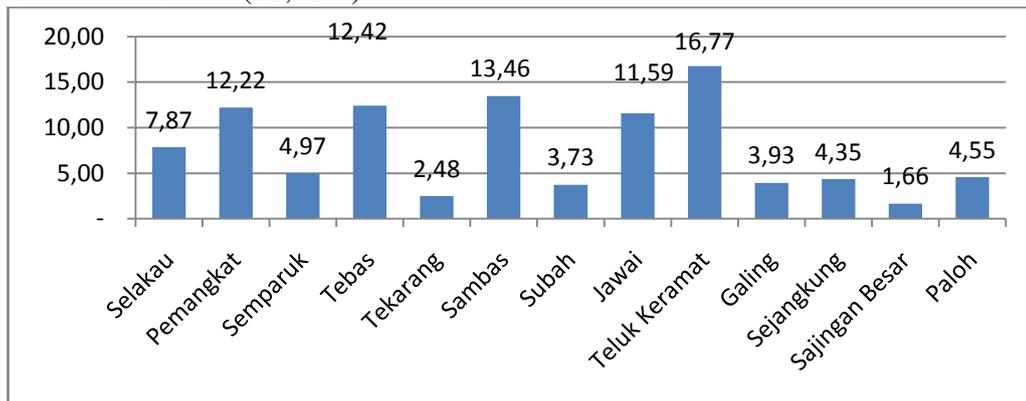
Dampak Sebelum dan Setelah Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Sambas

Penyebaran Penduduk

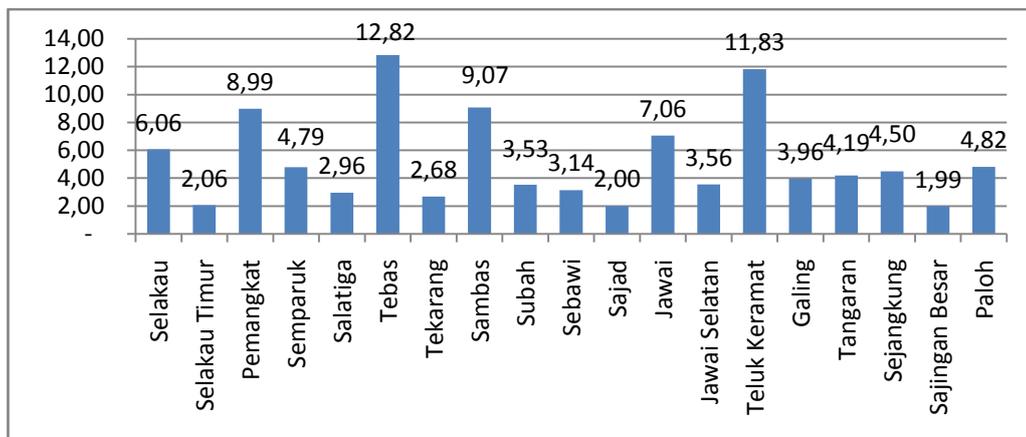
Tahun 2010, luas wilayah Kabupaten Sambas mencapai 6.395,70 Km², dengan jumlah penduduk sekitar 496.464 jiwa, dengan demikian tingkat kepadatannya hanya sekitar 78 jiwa/km². Relatif kecilnya tingkat kepadatan tersebut mencerminkan masih memiliki peluang untuk pengembangan komoditi potensi, terutama pengembangan sektor pertanian dan sektor lainnya.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Gambar 2 Dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk untuk masing-masing kecamatan sangat berbeda, artinya luas wilayah kecamatan tidak menggambarkan jumlah penduduk. Penduduk terpadat berada pada Kecamatan Teluk Keramat (17%), diikuti Kecamatan Sambas (13%), Kecamatan Tebas (12%), Kecamatan Jawai (12%) dan Kecamatan Pemangkat (12%), sementara kecamatan lainnya jumlah penduduknya berada di bawah angka 10%.

Sementara itu pada Gambar 3 yang merupakan jumlah penduduk setelah adanya kebijakan perluasan sawit di Kabupaten Sambas menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jumlah penduduk meningkat sebesar 18.853 jiwa (3,95%). Penyebaran penduduk setiap kecamatan lebih merata, misalkan jumlah penduduk terpadat semula Kecamatan Teluk Keramat (sebelum PKS) sekarang menjadi Kecamatan Tebas (12,82%).



Sumber : KDA Kabupaten Sambas, 2003
Gambar 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Sambas Sebelum PKS



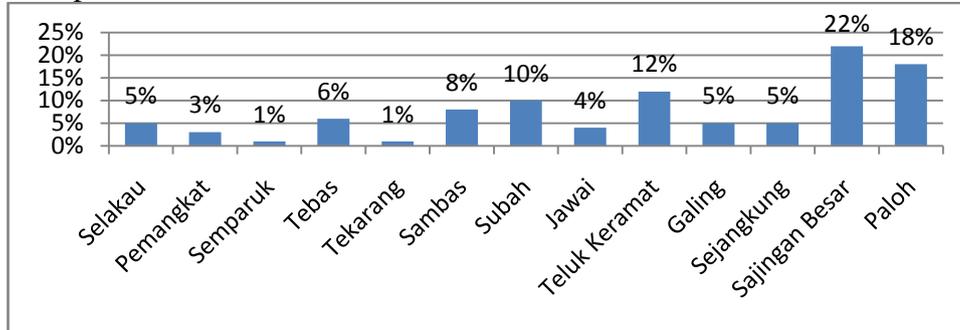
Sumber : KDA Kabupaten Sambas, 2012
Gambar 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Sambas Setelah PKS

Jumlah Kecamatan dan Luas

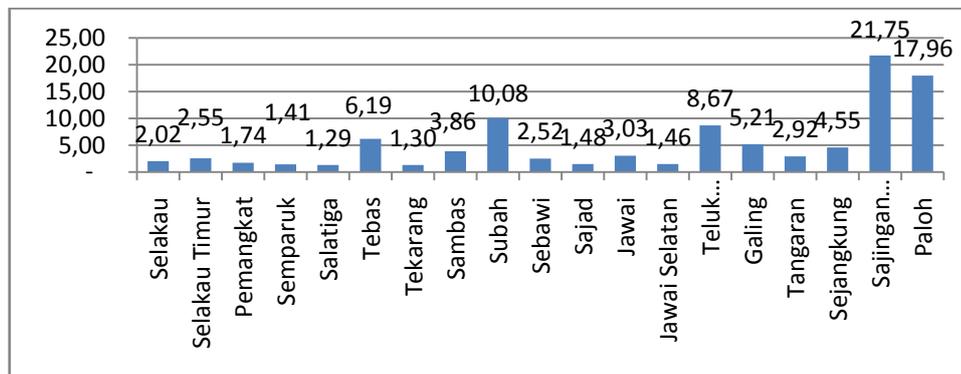
Luas Kabupaten Sambas adalah 6.395,70 km² atau sekitar 4,36 persen dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Daerah Pemerintahan Kabupaten Sambas pada tahun 2002 terbagi menjadi 13 Kecamatan dan 182 Desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sajingan Besar dengan luas 1.391,20 Km² atau 21,75 persen sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Tekarang dengan luas sebesar 83,16 Km² atau 4,44 persen dari luas wilayah Kabupaten Sambas.

Luas Kabupaten Sambas yang sama tetapi dengan bertambahnya wilayah menjadi 19 kecamatan menjadi luas untuk beberapa kecamatan berkurang. Hal tersebut juga berdampak kepada penyebaran penduduk menjadi lebih merata. Bertambahnya jumlah kecamatan seperti Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan

Salatiga, Kecamatan Sajad, Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Tangaran, dan Kecamatan Sebawi. Berikut merupakan luas wilayah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sambas.



Sumber : KDA Kabupaten Sambas, 2003
Gambar 4 Jumlah dan Luas Kecamatan sebelum PKS

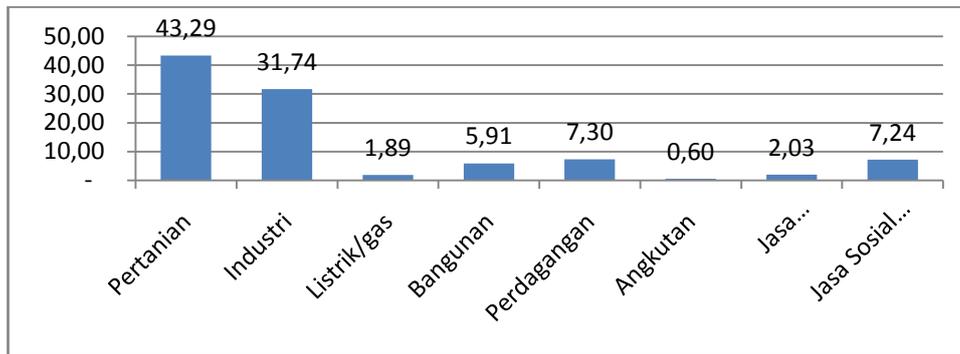


Sumber : KDA Kabupaten Sambas, 2012
Gambar 5 Jumlah dan Luas (%) Kecamatan setelah PKS

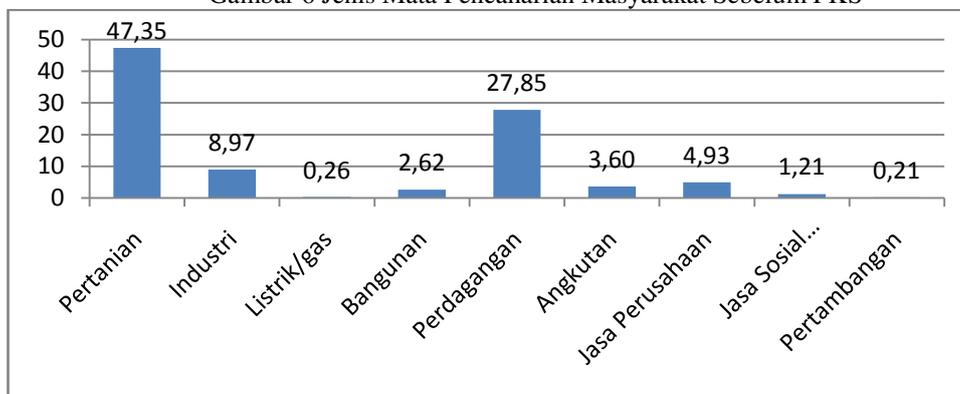
Pada gambar 5 menjelaskan bahwa dengan penambahan luas perkebunan sawit terjadinya penyebaran penduduk pada lokasi-lokasi perkebunan sawit yang selanjutnya menjadikan pemekaran wilayah, semula dari 13 kecamatan menjadi 19 kecamatan. Luas Kabupaten Sambas secara keseluruhan tidak berubah, akan tetapi luas masing-masing kecamatan berubah sesuai dengan pemekaran wilayahnya.

Jenis Mata Pencaharian Masyarakat

Sebelum berkembangnya kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sambas, sebagian besar masyarakat memanfaatkan keberadaan sumber daya pertanian sawah tadah hujan, perkebunan karet, sebagai buruh serta pegawai. Berikut ditampilkan data presentase mata pencaharian masyarakat sebelum dan setelah perluasan kelapa sawit.



Sumber : KDA Kabupaten Sambas, 2003
Gambar 6 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Sebelum PKS



Sumber : KDA Kabupaten Sambas, 2012
Gambar 7 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Setelah PKS

Berdasarkan data bahwa lapangan pada Gambar 6, usaha pada sektor pertanian/perkebunan masih merupakan porsi tertinggi 43% dalam memenuhi mata pencaharian masyarakat, diikuti oleh sektor industri 32%, serta sektor lainnya berada dibawah 10%. Sektor pertanian tersebut terdiri dari pertanian sawah tadah hujan merupakan jumlah terbesar selain perkebunan karet, lada, jeruk dan perkarangan.

Berdasarkan Gambar 7 bahwa lapangan usaha pada sektor pertanian/perkebunan masih merupakan dominasi 47,35% dalam memenuhi mata pencaharian masyarakat, diikuti oleh sektor perdagangan 27,85%, serta sektor lainnya berada dibawah 10%. Sektor pertanian tersebut terdiri dari perkebunan kelapa sawit, pertanian sawah tadah hujan merupakan jumlah terbesar selain perkebunan karet, lada, jeruk dan perkarangan.

Struktur PDRB Dalam Perekonomian

Pembangunan ekonomi regional pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, yang salah satunya diukur dalam indikator kenaikan PDRB atau kenaikan pendapatan regional perkapita. Bila pendapatan riil perkapita masyarakat meningkat maka akan terdapat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Gambaran pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam jutaan rupiah)

No.	Lapangan	Sebelum PKS (1999-2002)		Setelah PKS (2005-2011)	
		Rata-rata	Tertinggi	Rata-rata	Tertinggi
1	PERTANIAN	877,130.93	1,004,387.51	1,253,641.93	1,451,699.96
	a. Tanaman Bahan Makanan	609,908.26	674,790.72	802,356.13	910,177.58
	b. Tanaman Perkebunan	159,947.59	202,943.22	299,507.34	341,696.77
	c. Peternakan & Hasil-hasilnya	34,822.76	43,549.21	46,759.06	56,473.33
	d. Kehutanan	6,408.59	7,787.78	2,438.99	3,051.01
	e. Perikanan	66,043.73	78,322.26	102,580.40	141,317.76
2	<i>PERTAMBANGAN & PENGGALIAN</i>	4,095.24	4,844.07	5,160.80	7,066.80
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	210,054.33	252,705.23	246,129.32	280,838.13
4	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	5,064.82	7,021.66	6,792.77	8,179.83
5	BANGUNAN	55,217.88	63,788.56	66,486.36	85,502.79
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	529,606.44	621,448.64	732,386.63	874,676.78
7	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	80,589.94	99,468.80	96,490.25	112,098.51
8	KEUANGAN, PERSEW. & JASA PERUS.	98,374.07	116,702.85	115,705.94	131,303.87
9	JASA - JASA / SERVICES	89,622.19	111,164.47	129,653.37	151,790.70
	<i>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</i>	1,945,657.18	2,281,531.79	2,652,461.67	3,103,157.38

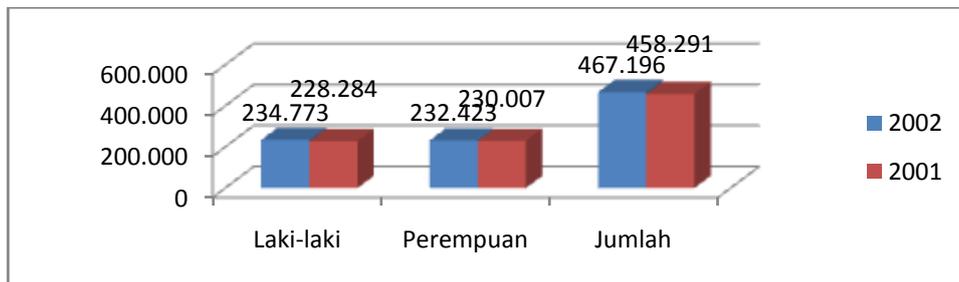
Sumber : KDA Kabupaten Sambas, 2013

Berdasarkan data bahwa pertumbuhan PDRB (sebelum PKS) dari tahun 1999 hingga 2002 mengalami peningkatan, tertinggi pada lapangan usaha masih bidang pertanian sebesar 43,84%. Sementara pada sektor pertanian, untuk lahan perkebunan menyumbang sebesar 8,86% masih dibawah sektor tanaman bahan makanan yang menyumbang sebesar 29,55%. Dengan kondisi ini secara umum sektor pertanian masih diunggulkan dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Sambas.

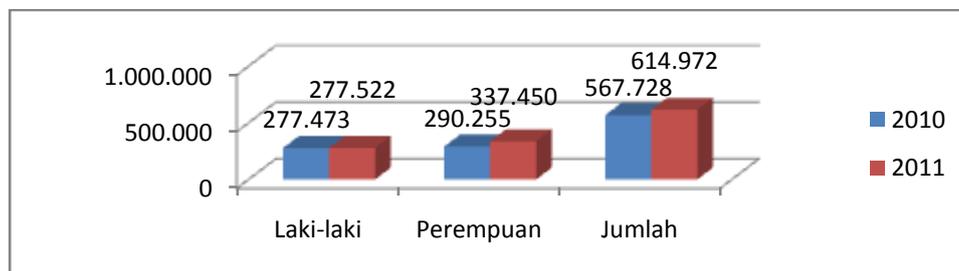
Setelah PKS pertumbuhan PDRB meningkat 73.51% jika dibandingkan sebelumnya. Peningkatan yang signifikan tersebut masih disumbangkan oleh sektor pertanian sebesar 46.79%. Sektor perkebunan menyumbangkan sebesar 10.99% masih berada dibawah tanaman bahan makanan sebesar 29.33%. jika dibandingkan dengan hasil perkebunan sebelum PKS maka terjadi peningkatan sebesar 24.04%. Disimpulkan dalam kurun waktu 7 tahun terjadi peningkatan setiap tahunnya sebesar 3.43% dari total sumbangan sektor perkebunan tahun 2011 sebesar 342 milyar atau 11.73 milyar pertahun.

Jumlah Tenaga Kerja

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka jumlah penduduk pada tahun 2002 tercatat 467.196 jiwa. Dan jika dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2001 yang mengalami penambahan sebesar 8.905 jiwa atau sebesar 1,91 persen. Kemudian jika dilihat dari sektor lapangan usaha maka sektor pertanian masih tetap mendominasi sektor-sektor lainnya, yaitu sebesar 79,20 persen.



Sumber : KDA Kabupaten Sambas, 2003
Gambar 8 Angkatan Kerja Sebelum PKS



Sumber : KDA Kabupaten Sambas, 2012
Gambar 9 Angkatan Kerja Setelah PKS

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2012 tercatat 175.261 jiwa dari jumlah penduduk sebesar 514.972 jiwa (KDA Kabupaten Sambas), artinya penduduk yang berada pada usia 25 hingga 50 tahun sebanyak 34,03%. Selanjutnya berdasarkan data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, bahwa tenaga kerja yang terlibat atau masyarakat yang menggantungkan hidup pada sub sektor perkebunan hingga Mei 2012 berjumlah 6.709 orang atau 1,3% dari jumlah penduduk dan atau sebesar 3,83% dari penduduk usia kerja. Perkebunan sawit hanya menyerap sebagian kecil tenaga kerja yang ada, sementara sebagian besar tenaga kerja berada di sektor lainnya.

Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan

Sumbangan sektor pertanian dalam struktur PDRB masih menjadi yang tertinggi terutama pada sub sektor perkebunan kelapa sawit. Progres perkembangan produksi tanaman sawit yang selalu meningkat setiap tahun, harapannya peningkatan tersebut berdampak pada peningkatan petani sawit beserta masyarakat pada umumnya.

Tabel 2. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan (dalam Ton)

JENIS TANAMAN	Sebelum PKS (1999-2002)		Setelah PKS (2005-2011)	
	Rata-rata	Tertinggi	Rata-rata	Tertinggi
1 Karet	14,179.50	14,789.00	15,799.77	16,892.08
2 Kelapa Dalam	12,855.50	13,586.00	14,739.92	14,153.68
3 Kelapa Hibrida	90.00	93.00	83.55	75.18

4	Kelapa Sawit	-	-	27,134.00	33,415.00
5	Lada	813.50	835.00	829.10	557.38
6	Kopi	737.02	776.03	795.01	755.00
7	Kakao	96.50	108.00	105.00	107.00
8	Aneka Tanaman	465.67	452.33	493.96	573.50
Jumlah		29,237.68	30,639.36	59,980.30	66,528.82

Sumber : KDA Kabupaten Sambas, 2013

Berdasarkan data dapat dijelaskan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang cukup besar dalam menyumbang devisa daerah. Berdasarkan beberapa komoditi unggulan pertanian, maka komoditi kelapa sawit merupakan dominasi dalam produksi. Pertumbuhan produksi kelapa sawit rata-rata per tahun sebesar 27.134 ton. Pada tahun 2010 kelapa sawit meningkat sebesar 25,96% dan pada tahun yang sama menyumbang sebesar 50,45% dari sektor tanaman perkebunan.

Kegiatan Perkebunan kelapa Sawit Di Kabupaten Sambas

Keberhasilan peningkatan kesejahteraan petani atau masyarakat melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan telah terbukti seperti yang dialami oleh petani atau masyarakat peserta PIR umum dan PIR Transmigrasi. Hal ini dapat terlihat dari pembangunan infrastruktur desa yang sangat baik. Mereka juga telah mampu memiliki kendaraan berupa sepeda motor dan bahkan mobil pribadi serta kemampuan menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan Tabel 3 Perkebunan sawit dari tahun ke tahun mengalami peningkatan luas area perkebunan. Luasan tanaman perkebunan sawit yang menghasilkan hanya 57,58% dari 52.325 Ha. Pola kerjasama tidak sepenuhnya menggunakan PIR yang sebagian kebun dikelola oleh petani, tetapi lebih banyak perkebunan sawit yang ada dikelola oleh perusahaan seutuhnya, masyarakat sekitar hanya sebagai buruh tani.

Tabel 3 Luas Perkebunan Sawit Tahun 2004 -2011

NO	PERUSAHAAN	LOKASI USAHA	TAHUN	INTI/ PLASMA	REALISASI TANAM		
					TM (Ha)	TBM (Ha)	JMH (Ha)
1	PT. Agro Nusa Investama	Sejangkung, Subah, Sajad	2005	Inti	5.745	1.497	7.242
			2008	Plasma	214	858	1.072
2	PT. Buluh Cawang Plantation	Galing, Paloh, Teluk Keramat	2006	Inti	400	989	1.389
			2010	Plasma	140	92	232
3	PT. Mitra Inti Sejati Plantation	Subah, Sejkung	2004		3.506	840	4.346
4	PT. Karya Boga Kusuma	Ds. Madak, Kec. Subah	2010			1.445	1.445
5	PT. Karya Boga Mitra	Ds. Madak, Kec. Subah	2009		294	2.195	2.489
6	PT. Rana Wastu Kencana	Tebas	2007		3.224	2.510	5.734
7	PT. Wana Hijau Semesta	Sajingan Besar, Sejangkung	2008			1.800	1.800
			2005			3.778	3.778
			2006			1.840	1.840
8	PT. Wirata Daya Bangun Persada	Sejangkung, Subah Sejangkung	2006		154	7.046	7.200
			2009		1.500		1.500

9	PT. Alao Kuning	Sajingan Besar, Sejangkung	2004			793	793	
10	PT. Kaliau Mas Perkasa	Sajingan Besar, Sejangkung	2006			3.538	3.538	
11	PT. Sentosa Asih Makmur	Galing, Paloh, Teluk Keramat	2006			310	310	
12	Pt. Sumatera Unggul Makmur	Tebas, Semparuk, Selakau, Pemangkat	2009			297	297	
13	PT. Putra Lirik Domas	Subah	2006			55	55	
14	PT. Karya Sukses Utama Prima	Tebas	2006			130	130	
15	PT. Patiware Satu	Jawai, Tangaran , Tik. Keramat	2009			10	10	
16	PT. Multi Daya Fortuna	Sejangkung, Subah	2009		205	681	886	
17	PT. Mitra Abadimas Sejahtera	subah	2008			2.010	2.010	
18	PT. Sambas Daya Sakti	subah	2008		360		360	
19	PT. Tanjung Rhu Plantations	Selakau Timur	2009		2.017		2.017	
20	PT. Agro Wiratama	Subah, Sajad	2010		647		647	
21	PT. Mulia Indah	Subah, Sambas, Sebawi, Sajad dan Sejangkung	2011			136	136	
22	PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman	Sejangkung, galing	2011	Inti	435	406	841	
			2011	Plasma	132	96	227	
JUMLAH						18.973	33.352	52.325

Sumber : BAPEDA Kab. Sambas, 2012

Pola perkebunan PIR yang terdiri dari perkebunan inti seluas 9.472 Ha dan perkebunan plasma seluas 1.531 Ha merupakan sebagian kecil dari perkebunan yang dikembangkan. Sementara selebihnya seluas 41.322 Ha adalah dikelola pihak swasta.

Dampak Positif Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit

Kondisi sebelum pembangunan perkebunan dengan setelah adanya kegiatan perkebunan pendapatan masyarakat semakin beragam. Keragaman ini semakin memperkuat stabilitas struktur pendapatan rumah tangga karena memberikan alternatif pemasukan bagi keluarga pada saat sumber pendapatan lain mengalami kegagalan usaha. Rata-rata pendapatan dari masyarakat pedesaan dari kelapa sawit sebesar 67,73%, sementara 32,27% bersumber dari pendapatan di luar perkebunan kelapa sawit.

Menurut data BPS Kabupaten Sambas (2010), pembangunan perkebunan kelapa sawit telah memberikan dampak ekonomi secara berantai, ini ditunjukkan dengan angka pengganda sebesar 3,52. Nilai ini dapat memberikan arti bahwa setiap pembelanjaan oleh petani kelapa sawit di lokasi dan sekitarnya sebesar Rp 100, secara sinerjik menjadikan perputaran uang di lokasi tersebut dan sekitarnya sebesar Rp 352 melalui bentuk-bentuk usaha, baik sektor riil maupun jasa.

Indek Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan indek kesejahteraan petani kelapa sawit di Kabupaten Sambas pada tahun 2000-2003 hanya sebesar 0,49 yang berarti tingkat pertumbuhan kesejahteraan meningkat sebesar 49 persen (sebelum PKS). Pada tahun 2005 indeks pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit meningkat lagi

menjadi 1,72 (setelah PKS). Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit mengalami kemajuan sebesar 172 persen. Pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh kelompok yang berpenghasilan 40 persen tertinggi sebesar 32,8 persen, sedangkan kelompok 60 persen terendah justru mengalami penurunan kesejahteraan sebesar 15,6 persen. Namun pada tahun 2006 memperlihatkan indeks pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit sangat dirasakan oleh kelompok pendapatan 40% terendah (miskin), ini dibuktikan dengan angka indeks pertumbuhan kesejahteraan bernilai positif 0,23. Kelompok berpenghasilan tertinggi (20% tertinggi) justru mengalami penurunan kesejahteraan (BPS Kabupaten Sambas)

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan (sumber melalui wawancara dengan Camat dan Kepala Desa), antara lain: 1) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan 3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Berdasarkan wawancara dengan aparat desa, petani dan buruh sawit, mereka memberikan keterangan bahwa beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar, antara lain: 1) Kegiatan pembangunan sumberdaya masyarakat desa; 2) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat; 3) Penyerapan tenaga kerja local; 4) Penyuluhan pertanian, kesehatan dan pendidikan; dan 5) Pembayaran kewajiban perusahaan terhadap daerah (pajak-pajak dan biaya kompensasi lain).

Dampak Negatif Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian, kepala desa, camat dan masyarakat, bahwa dampak sosial yang muncul dan paling signifikan akibat perluasan kebun sawit adalah konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat adat/lokal, petani dan buruh perkebunan sawit. Tak jarang konflik itu berujung pada kekerasan yang berakibat pada kekerasan, kriminalisasi, demo kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan wawancara dengan kepolisian dan pemerintah kecamatan, bahwa ditemukan beberapa kasus seperti perluasan areal Perkebunan Sawit diluar Hak Guna Usaha (HGU). Pihak swasta dengan didampingi oleh penguasa dari pemerintah kabupaten memberikan ijin diluar kebiasaan untuk memperluas perkebunan sawit. Akibatnya lahan petani atau masyarakat (legalitas lahan berbekal Surat Keterangan Tanah) yang berada di dalam izin dan di luar HGU dibabat oleh perusahaan menjadi lahan sawit.

Ketidakpuasan petani/masyarakat atas lahan tersebut mengajukan keberatan dan laporan kepada instansi terkait, tetapi laporan tersebut diabaikan dan terkesan lamban untuk diselesaikan. Akhirnya petani/masyarakat melakukan pemaksaan dengan pengrusakan kebun perusahaan dan melakukan pencabutan tanaman. Tetapi laporan perusahaan atas pengrusakan kebun sawit perusahaan ditanggapi pihak kepolisian dengan mempidanakan pelaku. Berdasarkan

wawancara dengan petani dan masyarakat, mereka sangat menyesali ketimpangan rasa adil tersebut.

KESIMPULAN

Kegiatan pembangunan perkebunan telah menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. Akibatnya di daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit. Perputaran uang yang terjadi di lokasi dalam jangka panjang diperkirakan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dengan tumbuhnya perdagangan dan jasa. Hal ini memberikan arti bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan *multiplier effect*, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha.

Kegiatan perkebunan kelapa sawit ternyata merupakan peluang investasi bagi pengembang swasta sebagai prospek yang cerah sehingga perluasan lahan terus-menerus dilakukan di daerah yang berpotensi. Pembukaan dan perluasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit menimbulkan banyak dampak bagi lingkungan, termasuk bagi masyarakat sekitar. Pembangunan dan pengembangan kelapa sawit memberikan dampak positif bagi masyarakat, contohnya pembangunan sarana-sarana bagi masyarakat sekitar, seperti pembangunan sarana transportasi, tempat ibadah, sarana olahraga, memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, dan lain-lain. Sementara dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial antara masyarakat dengan karyawan, hingga konflik sengketa lahan.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian hanya mengkaji perkembangan perluasan dan dampak positif/negatif perkebunan kelapa sawit, tetapi penelitian ini tidak memberikan alternatif penyelesaian kondisi negatif yang ditemukan di lapangan. Bagi penelitian yang selanjutnya diupayakan untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dengan adanya perluasan kelapa sawit di Kabupaten Sambas pada khususnya.

REFERENSI

- Arifin, B. 2004. Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Basri, Y.Z. (2003). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dalam Usahawan Indonesia XXXII(03):halaman 49-55.
- Gumbira-Sa'id, E. dan L. Febriyanti. 2005. Prospek dan Tantangan Agribisnis Indonesia. Economic Review Journal 200. (On-line). <http://209.85.135.104/search?q=cache:3-EDCELftAoJ>, diakses pada 11 Mei 2012.
- Halim, Abdul, 2004, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : UPP YKPN, Yogyakarta

- Imam Suroso, Arif, 2008, Analisis Daya saing dan Dampak Ekonomi Regional Pengembangan Kelapa Sawit Di Kabupaten Siak, IPB : Universitas Pertanian Bogor.
- Jamil, Ahmad, 2002., Menggali Potensi Otonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal, Jurnal Ekonomi Pembangunan, UII, Yogyakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno, 2001, Ekonomi Publik, BPFE, Edisi 3, Yogyakarta.
- Meier, G.M. 1995. Leading Issues in Economic Development. Oxford University Press. New York
- Saragih, Bungaran. 2001a. Suara dari Bogor: Membangun Sistem Agribisnis. Bogor: Yayasan USESE.
- Saragih, Bungaran. 2001b. Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Bogor: Yayasan USESE.
- Selva Johan, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 2, Desember 2011, hlm.311-317, Pekanbaru.
- Simatupang, P., 1997. Akselerasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Melalui Strategi Keterkaitan Berspektrum Luas. Pusat Penelitian SosialEkonomi. Bogor
- Sukirno, Sadono., 2001, Pengantar Teori Makro Ekonomi, Edisi 2, PT. Raja Grafindo Jakarta.
- Sudaryanto, T. Dan A. Munif. 2005. Pelaksanaan Revitalisasi Pertanian. Agrimedia, Volume 10 No. 2, Desember 2005
- Suhendra, E.S. 2004. Analisis Struktur Sektor Pertanian Indonesia: Analisis Model Input-Output. Jurnal Ekonomi dan Bisnis No. 2, Jilid 9, Tahun 2004: 55-65.
- Suryabrata, Sumadi, 2004, Metodologi Penelitian, Cetakan keenambelas, Universitas Gajah Mada, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahza, Almasdi. 2007. Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit, dalam Jurnal Ekonomi, Th.XII/02/Juli/2007, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, Jakarta.
- , 2011, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 2, Desember 2011, hlm.297-310, Pekanbaru.
- Tambunan, Tulus T.H, 2001, Perekonomian Indonesia ; Teori dan Temuan Empiris, Jakarta.
- Todaro, Michael P, 2000, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta.
- , UU No 18 Tahun 2004, Tentang perkebunan di Indonesia, Jakarta.
- , UU No. 20 Tahun 2010, Tentang Perubahan UU No. 21 Tahun 1997 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Ditjend Pajak.
- , Peraturan Ditjend Pajak No. PER-47/PJ/2010 Tanggal 22 Oktober 2010, Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), Ditjend Pajak.
- , Kabupaten Dalam Angka (KDA) Kabupaten Sambas, 2012.